

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan haruslah ditindaklanjuti dengan menerapkan pemerintahan yang baik. Good governance dan clean government telah mendorong segenap penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan amanat undang-undang. Namun fakta lapangan yang ditemukan masih banyak pemerintah daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya belum siap sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya (Widiyarta, Herawati, dan Atmadja, 2017).

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius dan krusial yang dapat mengancam kelangsungan hidup serta kredibilitas sebuah organisasi dalam berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Dampak dari tindakan *Fraud* ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial secara langsung yang terjadi melalui berbagai modus seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan aset, dan penyalahgunaan wewenang organisasi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang sangat luas, yaitu merusak reputasi organisasi dan menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan, baik dari kalangan internal organisasi sendiri maupun eksternal, seperti masyarakat,

investor, dan mitra bisnis. Di sektor swasta, *Fraud* merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kerugian besar bagi investor dan pemilik modal, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penurunan nilai perusahaan, menurunnya daya saing, serta hilangnya peluang investasi yang penting untuk pengembangan usaha di masa depan. Sedangkan di sektor publik, praktik *Fraud*, khususnya dalam bentuk korupsi, telah menimbulkan beban ekonomi yang sangat tinggi, yang dikenal sebagai fenomena biaya ekonomi tinggi (high cost economy). Selain itu, *Fraud* di sektor publik menyebabkan penurunan kualitas dan keterlambatan dalam pelayanan publik yang pada akhirnya menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar mereka.

Dampak berkelanjutan dari *Fraud* ini juga termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan institusi publik, yang penting dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh, *Fraud* di lembaga publik juga berkontribusi secara signifikan terhadap terhambatnya pemenuhan hak-hak masyarakat, menimbulkan ketimpangan sosial, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan *Fraud* menjadi sangat penting dan strategis untuk dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal yang andal dan efektif, implementasi Kompetensi SDM yang sehat, beretika, dan berintegritas, serta penerapan Moralitas Individu yang transparan dan dapat dipercaya sebagai mekanisme utama dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran sejak dini. (Adi Suputra, M. A. (2021).

Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang merupakan lembaga ekonomi desa yang berperan sangat penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal, risiko terjadinya *Fraud* sangatlah tinggi, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Berbagai penelitian empiris telah mengungkapkan bahwa Bumdes sering kali menghadapi sejumlah kelemahan yang signifikan, yang meliputi kurangnya pengawasan yang memadai dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lemahnya sistem pengendalian internal, serta rendahnya penerapan nilai-nilai integritas dan transparansi dalam budaya organisasi.

Khususnya di Kecamatan Ujungbatu, sejumlah Bumdes menghadapi tantangan nyata dalam membangun dan mengoptimalkan Moralitas Individu yang efektif, serta menciptakan Kompetensi SDM yang mampu mencegah terjadinya kecurangan secara signifikan. Kelemahan-kelemahan ini membuka jalan luas bagi praktik penyelewengan dana dan manipulasi pencatatan pendapatan asli desa yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang pada dasarnya harus mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga desa. (Anggoe, M., & Reskino, R. 2023).

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi instrumen utama pemberdayaan ekonomi desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa BUMDes sering kali menjadi ladang maraknya praktik *fraud*, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi dana desa.

Fenomena ini semakin mencolok di daerah pedesaan seperti Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, di mana BUMDes berperan krusial dalam mengelola sektor usaha simpan pinjam, perdagangan sembako, dan pengelolaan aset desa.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023, sebanyak 40% BUMDes di Riau mengalami temuan ketidaksesuaian keuangan senilai Rp 150 miliar, dengan *fraud* sebagai penyebab utama. Secara spesifik di Kecamatan Ujungbatu, kasus *fraud* di BUMDes Desa Ujungbatu pada 2024 mencuat ketika ketua BUMDes dilaporkan menggelapkan dana pinjaman sebesar Rp 250 juta dari program kemitraan dengan koperasi desa, yang seharusnya digunakan untuk modal usaha petani sawit. Kasus serupa terjadi di BUMDes Desa Pulau Melayu, di mana manipulasi laporan keuangan menyebabkan kerugian negara Rp 180 juta akibat mark-up pengadaan alat pertanian (sumber: Laporan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, 2025).

Berdasarkan data dan temuan dari berbagai studi terdahulu, risiko terjadinya *Fraud* di Bumdes sangat dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal serta kurangnya mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, masih banyak Bumdes yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencatatan keuangan, sehingga memperlebar celah yang memungkinkan terjadinya *Fraud*. Oleh sebab itu, kajian mendalam yang menginvestigasi pengaruh Moralitas Individu, sistem pengendalian internal, dan Kompetensi SDM terhadap pencegahan *Fraud* menjadi sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk memperbaiki tata

kelola Bumdes, tetapi juga untuk menguatkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. (Karolina, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dengan melakukan pengujian terhadap variabel-variabel penting tersebut secara sistematis dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan implikasi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas pengendalian *Fraud* di tingkat desa melalui penguatan mekanisme pelaporan, pengawasan internal yang optimal, dan pembentukan Kompetensi SDM yang kondusif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong terciptanya tata kelola Bumdes yang lebih transparan dan dipercaya publik, serta mendukung keberlanjutan Bumdes sebagai lembaga ekonomi desa yang kredibel yang berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Adanya latar belakang hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud* pada BUMDES di Kecamatan Ujungbatu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Moralitas Individu secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu?
3. Apakah Kompetensi SDM secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu?
4. Apakah Sistem Moralitas Individu , Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Moralitas Individu secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu?
2. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu?
3. Untuk mengetahui apakah Kompetensi SDM secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu?
4. Untuk mengetahui apakah Sistem Moralitas Individu , Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan etika organisasi.
- b) Menambah wawasan mengenai peran Moralitas Individu , sistem pengendalian internal, dan Kompetensi SDM dalam mencegah kecurangan pada perusahaan desa (BUMDES).
- c) Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji hubungan antar variabel tersebut dalam konteks organisasi publik atau desa.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Bumdes Kecamatan Ujungbatu: memberikan informasi dan rekomendasi praktis untuk memperkuat sistem pengendalian *Fraud* sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- b) Bagi pengelola Bumdes: membantu dalam merancang dan mengimplementasikan Moralitas Individu yang efektif serta membentuk Kompetensi SDM yang mampu mengurangi risiko terjadinya *Fraud* .
- c) Bagi pemerintah daerah: sebagai bahan evaluasi dan dasar kebijakan dalam mengatur dan mengawasi Bumdes agar lebih transparan dan akuntabel.
- d) Bagi masyarakat: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bumdes sehingga dapat meminimalisasi penyelewengan dana atau kecurangan yang merugikan publik.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan objek Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu
2. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM, 1 variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* .

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan (Ulfa Zahria Ashari, 2025) dengan judul “Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM sebagai Pencegahan *Fraud* Penyalahgunaan Aset” sedangkan penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM terhadap Pencegahan *Fraud* pada BUMDES di Kecamatan Ujungbatu”.

1. Variabel

Variabel penelitian sebelumnya menggunakan 2 variabel independen yaitu Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM serta 1 variabel independen Pencegahan *Fraud*. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu Moralitas Individu , Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM serta 1 variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* .

2. Objek penelitian

Objek penelitian sebelumnya dilakukan pada pegawai yang bekerja di perusahaan retail yang berada di wilayah Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini

dilakukan pada BUMDes di Kecamatan Ujungbatu.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menyajikannya dalam beberapa bab berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, ruang lingkup atau batasan masalah, keunikan atau kebaruan penelitian, serta struktur atau tata urutan penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan penelitian terkait dengan permasalahan yang dikaji, studi-studi relevan yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis, serta menyajikan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, tipe penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, serta cara analisis data yang diterapkan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil serta pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory atau teori keagenan merupakan teori yang pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh Jensen&Meckling pada tahun 1976. Yang mana berdasarkan *Agency theory* atau teori keagenan ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pemegang saham selaku pihak *principal* dan manajemen selaku pihak *agent* yang memiliki perbedaan tujuan dan kepentingan.

Yang mana pemegang saham memiliki tujuan yaitu agar investasi yang sudah dilakukan mendapatkan keuntungan yang besar . Sedangkan manajemen memiliki tujuan dan tanggung jawab untuk mengelola dan melindungi kepentingan pemegang saham karena memberikan aliran dana untuk keberlangsungan operasional perusahaan namun disisi lain manajemen juga ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dari hasil yang maksimal atas kinerja yang telah dilakukan. (Anggoe, M., & Reskino, R. (2023).

Teori keagenan (*Agency Theory*) juga mengasumsikan bahwa terdapat asimetris informasi atau ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak *principal* dan *agent*. Dimana pihak manajemen selaku *agent* memiliki informasi yang lebih luas dan juga memiliki akses yang lebih cepat dalam memperoleh informasi mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan para pihak *principal* atau pemegang saham. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak manajemen selaku *agent* untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan cara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya.

Berdasarkan Teori keagenan (*Agency Theory*) yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua permasalahan utama atau terdapat dua konflik utama antara pemegang saham yang bertindak sebagai *principal* dan manajemen yang bertindak sebagai *agen*. Konflik pertama yaitu terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan antara pihak *principal* dan *agen*. Konflik kedua yaitu terdapat asimetris informasi atau ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak *principal* dan *agent*. Dimana dari kedua konflik dan permasalahan tersebut dapat berujung pada tindakan kecurangan (*Fraud*) pada perusahaan.

2.1.2 *Fraud* (Kecurangan)

Kecurangan pada dasarnya adalah perilaku yang dilakukan individu atau manajemen suatu badan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan. Kecurangan merupakan salah satu yang mengkhawatirkan saat ini. Kecurangan terjadi diberbagai sektor ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Kecurangan atau dikenal dengan *Fraud* adalah tindakan memanipulasi data, penggelapan, pencurian, dan tindakan lain yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain atau pemerintah/organisasi. Pengklasifikasikan kecurangan dalam 3 jenis, yaitu :

1. Penyalahgunaan atau pencurian aset oleh orang lain Penyalahgunaan aset terdiri dari dua jenis: penyalahgunaan kas (*misappropriation cash*) dan penyalahgunaan non-kas (*misappropriation non-cash*). Yang pertama dapat berupa penyalahgunaan atau pencurian aset, seperti inventaris.
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan adalah ketika pejabat atau lembaga pemerintah menggunakan rekayasa keuangan untuk menutupi keadaan

keuangan sebenarnya untuk memperoleh keuntungan. Jenis kecurangan yang sulit diketahui adalah korupsi karena melibatkan kerja sama antara pihak lain dan keuntungannya sama-sama dirasakan.

2.1.3 Indikator Pencegahan Kecurangan

Menurut Agus Sulistiyo (2022), Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menekan atau menghilangkan sebab dari timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah dari pada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Indikator pencegahan *Fraud* adalah sebagai berikut (Rahimah, Yetty, dan Santi, 2018) :

1. Penetapan Kebijakan Anti *Fraud*

Merupakan dasar atau pedoman resmi yang disusun organisasi untuk mencegah terjadinya *Fraud* . Kebijakan ini mencakup aturan dan prosedur yang jelas untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan di lingkungan organisasi. Penetapan kebijakan menunjukkan komitmen manajemen dalam membangun budaya anti *Fraud* .

2. Pemisahan Fungsi

Adalah pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses kerja sehingga tidak ada satu orang yang menguasai seluruh aspek kegiatan yang berpotensi menimbulkan *Fraud* . Contohnya pemisahan antara pejabat yang melakukan pencatatan keuangan dengan yang melakukan pengesahan pengeluaran.

Komitmen Melaksanakan Kebijakan Anti *Fraud* yang Ditetapkan Mengindikasikan bahwa seluruh stakeholder, terutama manajemen dan pegawai,

secara aktif mendukung dan melaksanakan kebijakan anti *Fraud* secara konsisten. Komitmen ini tercermin dari sikap, tindakan nyata, serta pemberian sumber daya yang memadai.

3. Media Pendukung Operasional

Meliputi sistem, teknologi informasi, dan alat komunikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan anti *Fraud* . Contohnya penggunaan sistem pelaporan whistleblowing, perangkat lunak pengendalian intern, dan media sosialisasi kebijakan.

4. Pengendalian Internal

Merupakan prosedur, mekanisme, dan aktivitas pengawasan yang dirancang untuk mengurangi risiko *Fraud* dengan cara mengatur, memonitor, dan menilai pelaksanaan kebijakan. Pengendalian internal yang efektif mencegah peluang terjadinya *Fraud* dan membantu mendeteksi kecurangan sejak dini.

Indikator pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya frekuensi kasus penggelapan/mark-up (<5% per tahun)
- b. Kepatuhan pelaporan keuangan tepat waktu tanpa temuan BPK
- c. Budaya anti-*fraud* dengan zero tolerance policy
- d. Deteksi dini anomali keuangan sebelum kerugian >Rp50 juta
- e. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes

2.1.4 Moralitas Individu

Menurut Bertens (1993) moralitas (dari kata sifat latin moralis) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang moralitas suatu perbuatan, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk.

Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan 20 baik dan buruk. Welton (1994) menjelaskan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachchi menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika.

2.1.1 Indikator Moralitas Individu

Menurut (Rahimah, Yetty, dan Santi, 2018) indicator dari Moralitas Individu Adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas Indikator ini mengacu pada seberapa peka dan bertanggung jawab seorang pegawai terhadap peran dan kewajibannya dalam organisasi atau entitas tempat dia bekerja. Kesadaran ini mencerminkan komitmen pegawai untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi keberhasilan dan integritas entitas tersebut.

2. Nilai kejujuran dan etika

Indikator ini menunjukkan pentingnya pegawai memegang prinsip kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Nilai etika mengatur perilaku yang benar dan sesuai norma, sehingga pegawai mampu bertindak jujur dan adil tanpa menyimpang demi kepentingan pribadi atau kelompok.

3. Metaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas

Indikator ini menggambarkan sikap ketaatan pegawai terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh entitas. Kepatuhan pada aturan ini menunjukkan penghormatan pada sistem yang ada dan usaha menjaga keteraturan serta kepercayaan dalam lingkungan kerja.

4. Sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur

Indikator ini melihat bagaimana individu merespon dan memilih sikap ketika dihadapkan pada godaan atau kesempatan melakukan tindakan tidak jujur. Sikap ini menunjukkan integritas moral seseorang, apakah ia cenderung menghindari atau justru mudah tergoda untuk berbuat tidak benar.

Menurut (Yasrianto, 2021), indikator moralitaas individu Adalah sebagai berikut :

1. Integritas pribadi (tidak pernah pelanggaran etika)
2. Sensitivitas etika tolak manipulasi laporan
3. Tanggung jawab moral laporkan *fraud*
4. Kepatuhan norma agama/adat lokal
5. Prioritas integritas atas keuntungan materiil

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Marciano (2021), pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang dapat menekan terjadinya kecurangan Pengendalian Internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis serta kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi, direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal Perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan

kinerja Perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan, Perusahaan harus memiliki fungsi pengawasan internal dan dalam hal perusahaan telah memerlukan berupa satuan kerja Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan professional, pemegang fungsi atau satuan kerja pengawasan.

Pada pemerintahan di Indonesia, sistem pengendalian internal di atur dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain PP Nomor 60 tahun 2008, PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah juga memiliki pengertian mengenai sistem pengendalian internal. Menurut PP Nomor 8 tahun 2006 Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberi keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

2.1.3 Indikator Pengendalian Internal

Menurut Ningsih (2022), lemahnya pengendalian internal dapat terjadi ketika seseorang salah memahami instruksi atau berbuat keliru akibat kecerobohan, kebingungan, kelelahan, dan prosedur juga berkontribusi pada terjadinya gangguan akibat dari perubahan sistem yang tidak di sosialisasikan kepada anggota didalam

organisasi tersebut yang akan berdampak pada penurunan kinerja organisasi serta akan menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya efektivitas pengendalian internal memiliki lima komponen kerangka yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan komunikasi, di jabarkan sebagai berikut (Ningsih (2022)) :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian, internal yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi, unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif serta memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya serta mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat segera ditindak lanjuti.

6. COSO(*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)

Mendefinisikan sistem pengendalian internal melalui 5 komponen utama, yang masing-masing memiliki prinsip dan indikator operasional untuk evaluasi efektivitasnya, terutama dalam pencegahan *fraud* seperti pada BUMDes.

Komponen Utama COSO adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
- b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
- c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*)
- e. Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan dalam menjalankan pengendalian internal penting bagi organisasi karena tindakanlah yang

mengantarkan organisasi menuju kesuksesan meskipun pengendalian internal masih memiliki keterbatasan tapi hal tersebut tidak perlu menjadi penghalang dan tidak perlu menunggu sampai segalanya menjadi sesuatu yang sempurna, melalui pengawasan juga dapat menjadi sarana untuk melakukan perbaikan terus-menerus sehingga pengendalian internal tetap efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal dalam organisasi.

Menurut (Tardmizi, 2022), indikator Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut:

- a. Kode etik tertulis dan segregasi tugas
- b. Identifikasi risiko *fraud* tahunan
- c. Otorisasi ganda transaksi dan rekonsiliasi mingguan
- d. Saluran whistleblowing anonim
- e. Audit internal triwulanan dengan tindak lanjut cepat

2.1.4 Kompetensi SDM

Seseorang yang memiliki keterampilan yang cukup, pengetahuan yang baik, dan kemampuan yang memadai, penipuan biasanya dapat dengan mudah untuk dideteksi karena mereka lebih tahu daripada pelaku penipuan. Dalam melakukan pengelolaan dana desa aparat desa harus memiliki kecukupan kompetensi dengan kualitas baik yang didukung oleh pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan pemahaman tentang akuntansi, peraturan, prosedur, dan tujuan. Ini akan menghindari terjadinya suatu konflik.

Secara lebih rinci, kompetensi SDM mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan teknis yang dikuasai, keterampilan operasional, sikap kerja yang

mendukung, nilai-nilai yang dianut, serta karakteristik perilaku individu yang berpengaruh langsung terhadap kinerja. Kompetensi ini bukan hanya terkait dengan aspek hard skills (keterampilan dan pengetahuan) tetapi juga soft skills (sikap dan karakter), yang kesemuanya berkontribusi dalam menghasilkan kinerja yang optimal dan keberhasilan organisasi.

Dengan kompetensi yang tinggi, seorang individu akan mampu berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan, berkomunikasi efektif, bekerja sama dalam tim, dan menunjukkan inisiatif dalam pencapaian hasil kerja. Oleh karena itu, kompetensi SDM menjadi faktor penentu penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing organisasi di era modern ini.

Ringkasnya, kompetensi SDM adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang membuat individu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, yang pada akhirnya individu tersebut dan organisasi dapat mencapai hasil yang diharapkan secara optimal

2.1.5 Indikator Kompetensi SDM

Kompetensi sumber daya manusia memiliki 3 indikator, yaitu (Lesma Dewi, 2021):

1. Pengetahuan.

Pengetahaun adalah hal yang penting harus dimiliki oleh seseorang. Dengan memiliki pengetahuan seseorang dapat bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan dan pengetahuan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke hal yang baik sehingga hal tersebut berpengaruh dalam kompetensi SDM

2. Keahlian

Keahlian merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya keahlian dapat menjadi gambaran seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitasnya. Sehingga seseorang yang memiliki keahlian mempunyai pengaruh dalam kompetensi SDM.

3. Perilaku

Perilaku menjadi hal untuk melihat apakah seseorang memiliki kompetensi SDM yang baik. Perilaku seseorang dapat menentukan tingkat kompetensi yang dimiliki dan menentukan dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga seseorang yang berperilaku baik dapat mencegah terjadinya *Fraud*.

Indikator lain dari Moralitas Individu adalah sebagai berikut

- a. Pengetahuan akuntansi keuangan dan manajemen risiko
- b. Keterampilan laporan keuangan dan rekonsiliasi kas akurat
- c. Sikap profesional dan komitmen integritas (>80% evaluasi)
- d. Pengalaman kerja minimal 2 tahun di BUMDes
- e. Partisipasi pelatihan rutin Dinas PMD

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. 1. Hasil Penelitian Yang Relevan

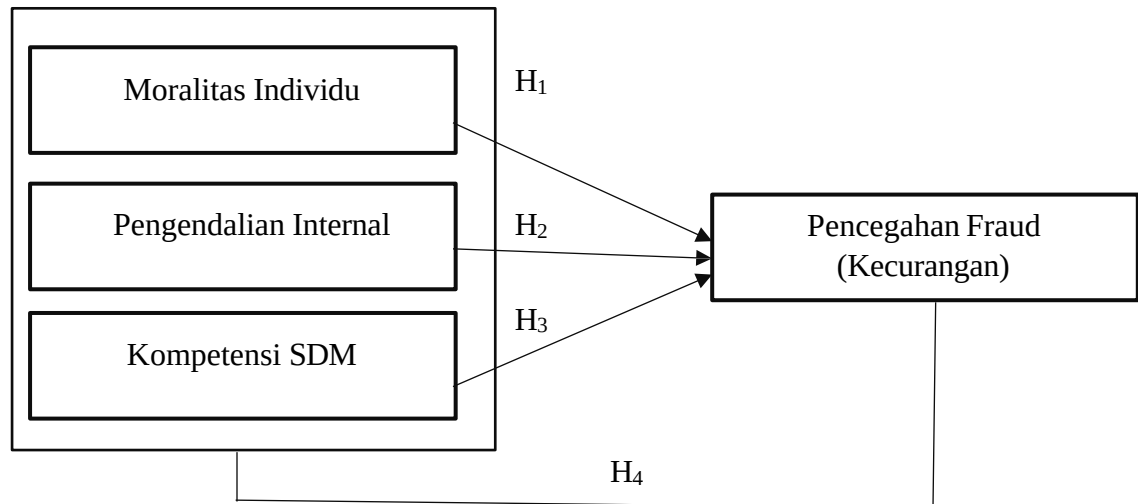
No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Ulfa Zahria Ashari (2025)	Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM sebagai Pencegahan <i>Fraud</i> Penyalahgunaan Aset	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan <i>Fraud</i> penyalahgunaan aset, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan <i>Fraud</i> penyalahgunaan aset, dan Kompetensi SDM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan <i>Fraud</i> penyalahgunaan aset. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh Perusahaan retail untuk mencegah <i>Fraud</i> penyalahgunaan aset
2.	Mardani Lista Arpani 2022	Pengaruh Moralitas Individu , kompetensi aparatur dan kesadaran Anti kecurangan	Kuantitatif	Dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Moralitas Individu berpengaruh terhadap

		terhadap pencegahan kecurangan (Studi Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau)		pencegahan kecurangan, artinya semakin efektif penggunaan Moralitas Individu maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik. 2) Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin baik kompetensi aparatur dalam bekerja maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik. 3) Kesadaran Anti Kecurangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin tinggi kesadaran anti kecurangan pegawai maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik.
3.	Siska Herlita 2021	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap pencegahan kecurangan(Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung. Besarnya pengaruh

		Kota Bandung)		pengendalian internal dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan sebesar 55%.
4.	Azhar Huwaiza Fathoni (2024).	Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Kuantitatif	Temuan penelitian menunjukkan adanya korelasi signifikan antara Moralitas Individu dan Pengendalian Internal dalam upaya meminimalisir <i>Fraud</i> di organisasi Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti selanjutnya terkait teori dan hasil penelitian yang relevan dengan topik ini.
5	Tiara Eka Putri 2023	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan: Peran audit internal, Sistem pengendalian internal dan komitmen Organisasi	Kuantitatif	Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Peran Audit Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan; 2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan; dan 3) Komitmen Organisasi

				berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1.Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

1. Moralitas Individu secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu

Moralitas Individu dapat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* karena moralitas mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan norma etika yang digunakan seseorang untuk membedakan antara yang benar dan salah dalam tindakan sehari-hari. Individu dengan moralitas tinggi cenderung memiliki kesadaran akan tanggung jawab, kejujuran, dan etika, sehingga mereka lebih mampu menahan diri dari tindakan curang demi keuntungan pribadi.

Ketika seseorang memiliki moralitas yang kuat, ia akan lebih mudah menolak godaan untuk melakukan kecurangan, bahkan jika ada peluang atau tekanan dari lingkungan kerja. Moralitas juga membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang memengaruhi niat dan tindakan seseorang, sehingga individu dengan prinsip moral yang kuat biasanya tidak terlibat dalam aktivitas

fraud.

Selain itu, Moralitas Individu dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan hubungan antar karyawan, sehingga memudahkan deteksi dan pencegahan *fraud*. Dengan kata lain, semakin tinggi Moralitas Individu, semakin kecil kemungkinan terjadinya *fraud*, karena individu tersebut akan lebih memilih untuk bertindak jujur dan sesuai aturan.

Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Mardani Lista Arpani, 2022) yang menunjukkan bahwa Moralitas Individu secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* .

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang relevan diatas maka dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1 : Moralitas Individu secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu

2. Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* karena sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dirancang untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengelola sumber daya organisasi secara efektif sehingga dapat meminimalisir potensi kecurangan. Dengan adanya pengendalian internal yang kuat, seperti prosedur, kebijakan, dan mekanisme pelaporan yang jelas, risiko terjadinya *fraud* dapat ditekan secara signifikan karena proses bisnis menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sistem pengendalian internal yang efektif juga mencakup pengawasan berkelanjutan dan deteksi dini atas penyimpangan, sehingga memungkinkan

organisasi mengambil tindakan korektif secara cepat sebelum kerugian bertambah besar.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *fraud*, karena pengendalian ini menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat dan budaya organisasi yang mendukung integritas. Pengendalian internal juga mendorong komunikasi dan informasi yang baik antar unit organisasi sehingga kecurangan dapat dihindari dan dicegah lebih awal. Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal yang efektif tidak hanya melindungi aset perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan fondasi bagi tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal adalah langkah strategis yang krusial dalam upaya pencegahan *fraud* dan menjaga keberlanjutan organisasi. Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Ulfa Zahria Ashari, 2025) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang relevan diatas maka dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2 : Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu

3. Kompetensi SDM secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu

Sistem kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* karena kompetensi yang memadai mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar operasional yang berlaku. Dengan kompetensi yang baik, SDM mampu mengenali potensi risiko kecurangan, meminimalkan peluang terjadinya *fraud*, dan menerapkan kontrol internal secara efektif. Selain itu, SDM yang kompeten biasanya memiliki kesadaran etik yang lebih tinggi, yang mengurangi kecenderungan perilaku curang.

Hal ini didukung oleh teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi dapat mengurangi peluang, tekanan, dan pembenaran yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, pengembangan sistem kompetensi SDM menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat pencegahan *fraud* di organisasi. Secara praktis, ketika karyawan memiliki kompetensi yang sesuai, mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cermat dan akurat, sehingga kesalahan atau tindakan *fraud* dapat diminimalisir. Kompetensi juga mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap pengendalian internal, kegunaan Moralitas Individu, dan mekanisme pelaporan yang efektif, sehingga *fraud* dapat dicegah dan dideteksi lebih dini. Oleh karena itu, organisasi perlu menginvestasikan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM sebagai upaya proaktif dalam meminimalkan risiko *fraud* dan menjaga integritas serta keberlanjutan bisnis.

Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Dani Lista Arpani, 2022) yang menunjukkan bahwa Kompetensi SDM secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang relevan diatas maka dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3 : Kompetensi SDM secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu

4. Sistem Moralitas Individu , Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu

Sistem Moralitas Individu , Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* karena ketiga elemen tersebut saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan organisasi yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mengidentifikasi serta mencegah tindakan kecurangan. Moralitas Individu menyediakan saluran aman bagi karyawan atau pihak terkait untuk melaporkan perilaku tidak etis secara langsung, sehingga meningkatkan deteksi dini atas potensi *fraud*. Sementara itu, Pengendalian Internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang sistematis untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud* melalui prosedur dan kebijakan yang jelas. Kompetensi SDM memastikan bahwa para pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap etis yang kuat untuk menjalankan pengendalian internal dan menggunakan sistem pelaporan secara efektif. Ketiga unsur ini jika diterapkan bersama-sama akan saling memperkuat efektivitas pencegahan *fraud* dengan mengurangi peluang,

menekan tekanan, dan menghilangkan rasionalisasi yang sering menjadi alasan pelaku melakukan kecurangan.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang relevan diatas maka dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4 : Sistem Moralitas Individu , Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah karyawan di Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Bumdes di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terdiri dari:

1. BUMDes Tebih Mandiri
2. BUMDes Damai Mandiri
3. BUMDes Ngaso Mandiri
4. BUMDes Timur Sejahtera

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Serta penelitian yang menguji pengaruh antara variable X terhadap variable Y

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah karyawan di Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Berikut jumlah populasi karyawan di Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau :

Tabel 3. 1. Jumlah Populasi

Nama BUMDes	Desa	Jumlah Karyawan
BUMDes Tebih Mandiri	Pematang Tebih	7
BUMDes Damai Mandiri	Suka Damai	12
BUMDes Ngaso Mandiri	Ngaso	8
BUMDes Timur Sejahtera	Ujungbatu Timur	10
Jumlah		37

Sumber : Data Kantor Desa Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah populasi pada penelitian ini adalah 37 karyawan di Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Wasis, 2017). Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah metode pengambilan sampel di mana seluruh anggota dari populasi dijadikan sampel penelitian, tanpa kecuali. Dengan kata lain, tidak ada individu dalam populasi yang diabaikan atau tidak dipilih, sehingga semua elemen populasi menjadi bagian dari sampel. Teknik ini biasanya dipakai ketika populasi relatif kecil atau terbatas, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lengkap dan komprehensif dari seluruh anggota populasi.

Penggunaan teknik sampel jenuh sangat cocok dalam penelitian dengan populasi kurang dari 100 orang, di mana peneliti ingin mendapatkan hasil yang representatif dan menghindari kesalahan sampling. Teknik ini tidak memerlukan proses pemilihan acak atau sampling lain karena semua anggota sudah otomatis menjadi sampel. Sampel jenuh juga sering diterapkan dalam studi kasus,

penelitian eksploratif, atau saat peneliti membutuhkan data yang kaya dan mendalam.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 37 karyawan Bumdes Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu analisis kuantitatif merupakan metode analisis dengan angka-angka yang dihitung maupun yang diukur.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden serta langsung dilokasi penelitian. Data primer dari penelitian ini berasal dari kuisioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang variabel yang diteliti dan diisi langsung oleh responden

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan agar memperoleh data yang akurat serta relevan untuk menganalisis permasalahan tersebut maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder serta diperlukan untuk menunjang, melengkapi dan menyempurnakan data primer, serta bertujuan untuk mengetahui berbagai

pegetahuan atau teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya berasal dari buku, majalah dan jurnal ataupun berbagai literature relevan dengan penelitian.

2. Kuisoner. Menurut Sekaran dan Bougie (2013) kuisoner merupakan pernyataan tertulis yang di buat untuk responden sebagai alternatif pengumpulan data, kuisoner didesain untuk mengumpulkan jumlah besar data yang sifatnya kuantitatif. Kuisoner merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien apabila penelitian mengetahui dengan tepat dengan apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuisoner. jawaban yang disediakan dalam setiap pertanyaan,

3.7 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdiri atas 3 variabel independen Moralitas Individu , Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM serta 1 variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* . Adapun variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasi seperti terlihat pada Tabel 3. 2.

Tabel 3. 2. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Moralitas Individu (X1)	Menurut Bertens (1993) moralitas (dari kata sifat latin <i>moralis</i>) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang moralitas suatu perbuatan, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan 20 baik dan buruk.	(Rahimah, Yetty, dan Santi, 2018) 1. Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas 2. Nilai kejujuran dan etika 3. Menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas 4. Sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur	Likert
Sistem Pengendalian Internal (X2)	Menurut Marciano (2021), pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang dapat menekan <i>terjadinya</i> kecurangan Pengendalian Internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis serta kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi, direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal	(Yana Dewi, 2023) : 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasidan Komunikasi 5. Pemantauan	Likert
Kompetensi SDM (X3)	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan, keahlian, dan karakteristik yang dimiliki oleh individu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan perilaku	(Lesma Dewi, 2021): 1. Pengetahuan. 2. Keahlian 3. Perilaku	Likert

	yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara efektif dan profesional dalam suatu organisasi.		
Pencegahan <i>Fraud</i> (Kecurangan) (Y)	Kecurangan pada dasarnya adalah perilaku yang dilakukan individu atau manajemen suatu badan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.	(Afriyani, 2023) 1. Penetapan Kebijakan Anti <i>Fraud</i> 2. Pemisahan Fungsi 3. Media Pendukung Operasional 4. Pengendalian Internal	Likert

3.8 Instrumen Penelitian

Kuesioner dengan format skala likert yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan responden memberikan jawaban dalam berbagai versi tingkatan yang tertuang dalam setiap butir yang menguraikan karakteristik responden diantaranya jenis kelamin, umur, masa kerja dan pendidikan.

Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2018) yaitu “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Skor setiap pernyataan pada kuesioner dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3. 3. Penilaian Skor Terhadap Jawaban Kuesioner

No	Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu- Ragu (RG)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2018).

Instrumen dalam penelitian ini diuji dengan uji instrumen terdiri dari:

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas Instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kebenaran suatu instrumen. Untuk menguji validitas instrumen dapat digunakan cara analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap-tiap item jawaban dengan skor total item jawaban.

Dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0.05, maka apabila nilai r lebih besar dari nilai kritis (r_{tabel}) berarti item tersebut dikatakan valid. Dalam penelitian ini nilai r dihitung dengan bantuan program SPSS for Windows versi 18.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji reliabilitas dapat digunakan rumus alpha Cronbach's diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach's 0 sampai dengan 1. Reliabilitas suatu konstruk (unsur) variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha > dari 0.60.

3.9 Teknik Analisis Data Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya pengukuran secara kuantitatif dari hasil pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan untuk selanjutnya dilakukan analisa atas hasil pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini teknik analisa adalah sebagai berikut :

3.9.1 Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal (45°), dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018).

2. Uji Multikolinearitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedasitas.

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedasitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil atau besar. Model

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3.9.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara satu dependen variabel dengan dua atau lebih independen variabel yang dapat dinyatakan dengan rumus (Sugiyono, 2018):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Variabel terikat “Pencegahan *Fraud* (Kecurangan)”
- α = Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila $X=0$
- β = Koefisien regresi dari variabel bebas
- X_1 = Moralitas Individu
- X_2 = Sistem Pengendalian Internal
- X_3 = Kompetensi SDM
- e = Standar error

3.9.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji-t

Dengan menggunakan uji parsial (uji-t), untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dengan uji-t untuk membandingkan nilai p dengan α pada taraf nyata 95% dan $\alpha= 0.05$.

Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan bantuan program SPSS for Windows versi 18. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu:

Ho diterima jika : $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau signivikan ≤ 0.05

Ho ditolak jika : $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau signifikan ≥ 0.05

2. Uji-F

Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara simultan. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu :

Ho diterima jika : $f_{hitung} \geq f_{tabel}$ atau signivikan ≤ 0.05

Ho ditolak jika : $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ atau signifikan ≥ 0.05

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel dependen atau tidak bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2018).